

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

**REGRESI BERGANDA METODE BACKWARD UNTUK
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

MAYA MARYANAH

NIM. 17305144008

MATEMATIKA E 2017
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul
**“REGRESI BERGANDA METODE BACKWARD UNTUK ANALISIS
FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA”**

Disusun oleh :

Nama : Maya Maryanah

NIM : 17305144008

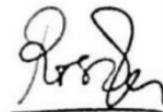
telah dilaksanakan dan dinilai oleh Dosen Pembimbing PKL pada tanggal 12 Oktober 2021 dan dinyatakan LULUS.

Dosen Pembimbing:

1. Nama : Rosita Kusumawati, M.Sc.

NIP : 1980072005012001

Tanda Tangan :

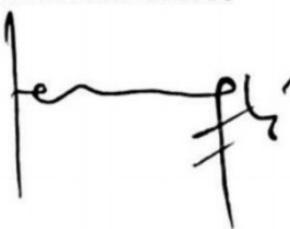


a. n. Pembimbing Lapangan:

2. Nama : Nugrahaningtyas Nevi Puspitorini

NIP : 197211301992012001

Tanda Tangan :



Yogyakarta, 18 Oktober 2021
Koordinator PKL

Ketua Program Studi Matematika
Jurusan Pendidikan Matematika
FMIPA UNY

Dr. Sri Andayani, M.Kom.
NIP. 197204261997022001

Prof. Dr. Agus Maman Abadi, M.S
NIP. 197008281995021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta serta menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan sebagai bentuk tanggung jawab penulis dalam memenuhi mata kuliah praktik kerja lapangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ariswan selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Dr. Sri Andayani, S.Si., M.Kom selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika
3. Dr. Sri Andayani, S.Si., M.Kom selaku Ketua Prodi Matematika
4. Rosita Kusumawati, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
5. Bambang Sutriyanto, S.H., M.M. selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan nasehat dan pengarahan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
6. Segenap Pimpinan dan Staff Bidang Umum dan Bidang Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
7. Segenap pegawai KPP Pratama Yogyakarta yang telah banyak membantu sehingga pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat berjalan lancar.
8. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan dukungan.
9. Marwah, Uminasiah, Azizah, dan Sesha sebagai teman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan penuh makna dan berkesan.

10. Teman di Prodi Matematika angkatan 2017 yang banyak membantu dan mendukung penulis selama praktik kuliah lapangan dan penyelesaian laporan praktik kuliah lapangan.

Laporan praktik kerja lapangan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan saran yang membangun agar laporan praktik kerja lapangan ini dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Penulis berterima kasih dan memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika.

Cirebon, 10 Oktober 2021

Penulis,



Maya Maryanah

17305144008

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	9
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Yogyakarta.....	9
2. Visi dan Misi KPP Pratama.....	10
3. Tugas dan Fungsi Institusi	10
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ...	12
B. Pajak	15
C. Analisis Regresi Linear	22
1. Estimasi Parameter	25
2. Korelasi	27
3. Korelasi Ganda.....	28
4. Korelasi Parsial	28
5. Uji Asumsi.....	28
6. Pemilihan Model Terbaik dengan Metode <i>Backward</i>	31
D. Program R	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Praktik Kerja Lapangan	35
B. Desain Praktik Kerja Lapangan	35
C. Objek Praktik Kerja Lapangan.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Praktik Kerja Lapangan	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	38
B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta	39
1. Penyusunan Model Regresi dengan Metode Backward	41
2. Uji Hipotesis F	43
3. Uji Hipotesis t.....	44
4. Koefisien Determinasi.....	45
5. Uji Asumsi.....	46
6. Interpretasi Model	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	20
Tabel 4.1. Data Penerimaan Pajak dan Target Pajak Penghasilan Orang Pribadi	38
Tabel 4. 2. Hasil Olah Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Yogyakarta	40
Tabel 4. 3. Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Yogyakarta Hasil Normalisasi	41
Tabel 4. 4. Step 0 Uji AIC Metode Backward	42
Tabel 4. 5. Step 1 Uji AIC Metode Backward	42
Tabel 4. 6 Model Regresi	43
Tabel 4. 7 Uji F	43
Tabel 4. 8 Uji t	44
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinasi	45
Tabel 4. 10 Uji Normalitas.....	46
Tabel 4. 11 Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4. 12 Uji Autokorelasi.....	48
Tabel 4. 13 Uji Heteroskedastisitas.....	49
Tabel 4. 14 Model Regresi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Sleman.....	12
Gambar 4. 2 Plot Uji Normalitas	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kegiatan.....	56
Lampiran 2 Tabel Data Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Yogyakarta	59
Lampiran 3 Rumus Pengolahan Data.....	62
Lampiran 4 Script perhitungan di Program R	63
Lampiran 5. Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan.....	66

**Regresi Berganda Metode *Backward* Untuk Analisis Faktor-Faktor
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Maya Maryanah
17305144008

ABSTRAK

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, dimana kurang lebih 65% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, kenaikan PTKP, dan kebijakan *sunset policy* jilid 2 terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

Variabel terikat yang digunakan dalam analisis yaitu penerimaan pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel bebasnya yaitu pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, kenaikan PTKP, dan kebijakan *sunset policy* jilid 2. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pemilihan model terbaik yaitu mengolah data dan menormalisasikan data yang didapatkan dari KPP Pratama Yogyakarta, dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik, uji parameter distribusi F dan uji parsial t, lalu dilanjutkan dengan melakukan pemilihan model terbaik menggunakan Metode *Backward* dengan melihat nilai AIC.

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai AIC sebesar 18,187 dan nilai R sebesar 0,923. Dan variabel kepatuhan wajib pajak, dan kebijakan *sunset policy* jilid 2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel kenaikan PTKP tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: *Penerimaan Pajak, Model Terbaik, Metode Backward*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, dimana kurang lebih 65% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Alokasi pajak dalam sektor pemerintah digunakan untuk belanja pegawai, gaji PNS, pembangunan insfrastuktur negara, pemeliharaan, penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, pengembangan pariwisata, perlindungan sosial, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, dan lain-lain (Keuangan, 2020a).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mengelola serta mengarahkan kondisi perekonomian lewat pengendalian pengeluaran dan penerimaan pajak. Kebijakan fiskal digunakan untuk memaksimalkan pendapatan negara untuk disalurkan ke program-program yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional, serta digunakan sebagai perangkat untuk mencapai keseimbangan ekonomi (onlinepajak, 2018). Tingkat penerimaan pajak yang wajar dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perlu direncanakan dalam upaya penerimaan pajak (Molle et al., 2014).

Pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kebijakan fiskal. Pajak merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Selain itu, pajak merupakan instrument fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian serta menciptakan keadilan sosial. Ketika penerimaan negara dari sektor pajak tinggi, maka pemerintah akan mampu mengalokasikannya pada program strategis (onlinepajak, 2018)

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Negara Indonesia mengenakan pajak penghasilan atas pendapatan orang pribadi dan badan berdasarkan berbagai ketentuan. Pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran aktif rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung keuntungan yang didapat dari pemungutan pajak yang pemerintah lakukan. Kenikmatan dari hasil pajak yang dapat dirasakan oleh warga negara secara fisik dan non fisik. Secara non fisik antara lain adalah, rasa aman, karena adanya alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara dan warga yang pemberiannya sebagian besar bersumber dari pajak yang telah dipungut oleh negara. Sedangkan secara fisik manfaat pajak dapat dirasakan dalam bentuk fasilitas umum seperti terminal, stasiun, bandara, bangunan sekolah, rumah sakit umum, dan lain-lain.

Pada konferensi pers laporan APBN Tahun 2019 di Jalan Djuanda, Sri Mulyani menyatakan bahwa, “realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2018, realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,7%. Penerimaan pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 Triliun atau 85% dari target APBN tahun 2019, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 405 triliun atau 107,15 dari target APBN tahun 2019, dan hibah sebesar Rp6,8 triliun. Dimana capaian perpajakan tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018.” (Keuangan, 2020b)

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak berusaha meningkatkan jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi pajak. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang diatur oleh Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-14/PJ/2019 tanggal 12 Juni 2019. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. Dari 267 juta penduduk Indonesia, menurut informasi Nota Keuangan bersasarkan RAPBN 2020, jumlah Wajib Pajak pada 2019 tercatat 42 juta, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak tahun 2017 sebanyak 36 juta dan tahun 2016 sebanyak 32,8 juta. Pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2019, 38, 7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi dan 3,3juta merupakan NPWP badan (Redaksi DDTCNews, 2019).

Wajib Pajak Efektif adalah jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dalam penelitian ini digunakan SPT Tahunan. Indikator untuk memperoleh jumlah tersebut adalah dengan melihat jumlah SPT Tahunan

yang disampaikan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal menurut norma perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini adalah ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan. Indikator yang digunakan adalah dengan menggunakan jumlah SPT tahunan yang diterima oleh KPP Pratama yaitu sebelum 31 Maret.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka DJP harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan sevara maksimal akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak. (Saputro, 2013). Selain kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak, peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh penting terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui potensi pajak, naiknya PTKP akan mempengaruhi penurunan jumlah pembayar pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar. (Ramli, 2006)

Direktorat Jendral Pajak memperhatikan adanya potensi penurunan jumlah pajak yang harus dibayar karena meningkatnya PTKP dan pada tahun 2014 terjadi kurang maksimalnya jumlah penerimaan Pph yang hanya mencapai Rp88.424,57 miliar atau 82% dari target, maka Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2015 menerbitkan kembali kebijakan *Sunset Policy* yang pernah diterbitkan tahun 2008 yang kini dinamakan dengan *Sunset Policy* Jilid 2. Kebijakan ini berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sesuai dengan Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007. Kebijakan ini diharapkan dapat

berpengaruh dalam mendorong peningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target. (Wulandari, 2015)

Penerimaan pajak sangat penting untuk pembangunan nasional, analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak perlu dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan pajak negara. Dalam bidang statistika, salah satu metode untuk mengetahui variabel - variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas adalah analisis regresi linier (Harlan, 2018). Dalam penyusunan model regresi dikenal beberapa metode seperti metode *enter*, metode *forward*, metode *backward*, dan *stepwise*. Metode *backward* bekerja dengan melakukan uji beruntun, yaitu menghilangkan variable bebas satu persatu untuk mendapatkan model terbaik.

Penelitian terhadap faktor-faktor penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi telah banyak dilakukan, diantaranya adalah “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama” penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan variabel terikatnya yaitu penerimaan pajak sedangkan variabel bebasnya yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, PTKP, dan *Sunset Policy* Jilid 2. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. (Wulandari, 2015)

Metode analisis regresi linear berganda juga digunakan pada penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Manado” dengan menggunakan variabel terikat penerimaan pajak dan variabel bebas yaitu kepatuhan

pajak dan pencairan tunggakan pajak. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Manado tinggi yaitu 82,87% dari target penerimaan dan kedua variabel bebasnya memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Molle et al., 2014). Penelitian lain yang membahas mengenai faktor-faktor penerimaan pajak yaitu “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017” dengan menggunakan faktor *Tax Amnesty*, pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara varibel *Tax Amnesty* dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. (Desideria & Ngadiman, 2019)

Berangkat dari pentingnya peningkatan penerimaan pajak dan manfaat penerimaan pajak untuk pembangunan nasional, penulis tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Penulis mengangkat judul “Pemilihan Model Terbaik Metode *Backward* (Studi Kasus : Faktor-Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Yogyakarta)” dengan menggunakan variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau yang selanjutnya disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan variabel bebasnya yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, PTKP, dan *Sunset Policy* Jilid 2.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang dikaji merupakan salah satu aspek yang penting dalam penulisan laporan ini. Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari

adanya tumpang tindih pembicaraan di luar sasaran yang akan dicapai. Melalui pembatasan masalah ini, penulis akan memberikan batasan pengertian tentang ruang lingkup sasaran yang akan dikaji. Dalam pembahasan penelitian ini, penulis hanya akan membahas Faktor-Faktor Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta yang terdiri dari variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan kebijakan *sunset policy* jilid 2 dengan menggunakan metode *Backward*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka berikut ini dirumuskan masalah dalam skripsi ini:

1. Bagaimana penerapan analisis regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan metode *backward*?
2. Apa saja faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan model regresi dengan metode *Backward* untuk analisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan kebijakan *sunset policy* jilid 2 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.

2. Mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang diterapkan pada Pajak Penghasilan pasal 21 untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

3. Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Penghasilan pasal 21.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Yogyakarta

Sejarah kantor pajak di Indonesia ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama *inspektien yan financien* yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah kekuasaan kantor pajak jatuh ke tangan Jepang, Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulai saat itu, kantor Penetapan diganti namanya dengan Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian pada tahun 1960 diubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1986.

Dari tahun ke tahun terjadi perkembangan di Kantor Pajak ditambah semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia, Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986. Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah DJP D. I. Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Sedangkan *launching* kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007.

2. Visi dan Misi KPP Pratama

a. Visi KPP Pratama

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

b. Misi KPP Pratama

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

3. Tugas dan Fungsi Institusi

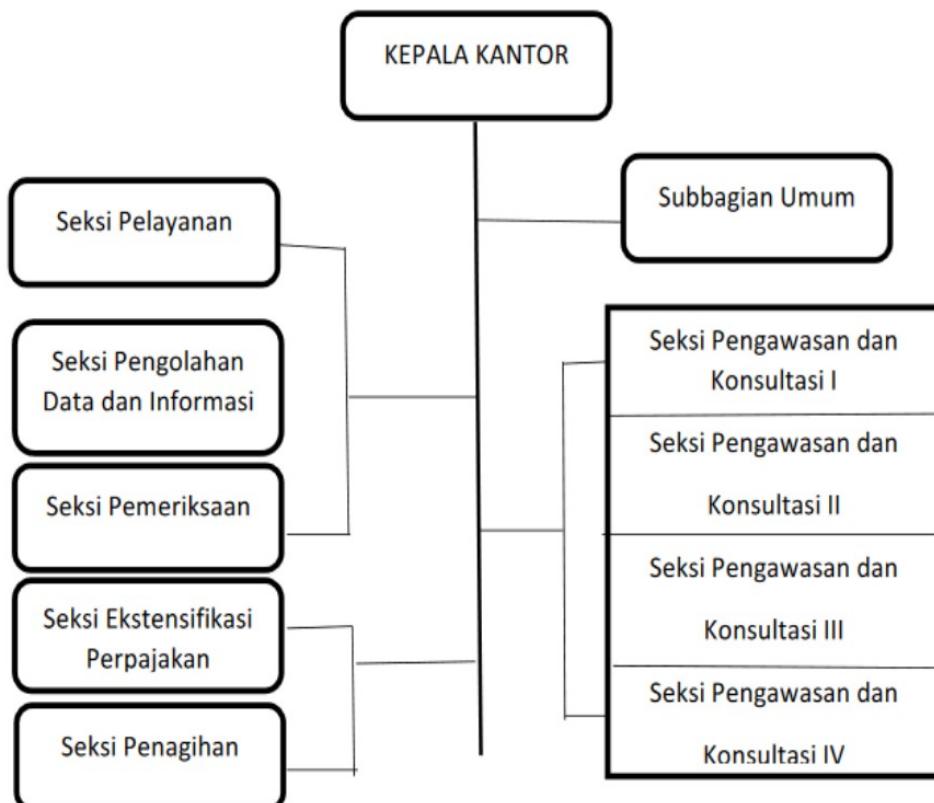
Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan operasional di bidang pajak Negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan undangundang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Adapun pajak-pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Adapun beberapa fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
- b. Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
- c. Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantauan dan penyusunan laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.
- d. Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM,PBB & BPHTB dan PTLL.
- e. Verifikasi dan penerapan sanksi pajak.
- f. Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g. Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebuah lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di kota Yogyakarta.

4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Sleman

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama (2015)

Dari struktur organisasi di atas, setiap seksi mempunyai tugas masing-masing, berikut tugas dari setiap seksi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bertugas untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap

kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pelayanan

Bertugas untuk menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan, menerima surat lainnya serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas untuk melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

d. Seksi Penagihan

Bertugas untuk melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan

lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Bertugas untuk melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdapat 4 (empat) bagian yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 bertugas untuk melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

h. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Bertugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

i. *Supporting Team*

Bertugas untuk membantu kinerja pelayanan kantor agar pelayanan Wajib Pajak dan kinerja pegawai pajak dapat berjalan lancar dan optimal.

B. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (*Materi Perpajakan Umum, Pahami Dan Ketahui Bidang Pajak Lebih Jauh*, n.d.)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak terdiri dari berbagai jenis, antara lain pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi bangunan, pajak barang mewah, dan pajak kendaraan bermotor.

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau mendapatkan penghasilan dalam tahun pajak yang nantinya oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan rakyat. (Komarawati & Mukhtaruddin, 2012)

Pajak penghasilan orang pribadi dikenal dengan nama PPh 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/205 PPh Pasal 21 adalah Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sehingga pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan keuangan negara yang harus dimaksimalkan penerimaannya oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga menambah devisa keuangan negara.

Variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP, dan kebijakan *sunset policy* jilid 2 sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan. (Wulandari, 2015)

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan PPh 21 ialah kepatuhan wajib pajak.

Menurut Norman D.Nowak Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Variabel operasional dari kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan mengadopsi instrument yang digunakan dalam penelitian dimana variabel ini diukur berdasarkan persentase perbandingan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan skala rasio.

b. Pemeriksaan Pajak

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penerimaan pajak selain kepatuhan wajib pajak ialah pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. (Mardiasmo, 2018)

Dimana undang-undang perpajakan yang baru, memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang/tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap Wajib Pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.

Menurut OnlinePajak, “direktur jenderal pajak merupakan pihak yang menjalankan pemeriksaan pajak. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Dirjen pajak punya dua tujuan.”

Pertama, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kedua, untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk tujuan pertama, pemeriksaan pajak dilakukan dalam hal:

- 1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 3) Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
- 4) Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
- 5) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
- 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan. (Herryanto & Toly, 2013)

Pemeriksaan pajak merupakan variabel numerik dengan variabel operasional dari pemeriksaan pajak dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian (Wulandari, 2015) diukur berdasarkan rasio dari jumlah SPT

yang menyatakan lebih bayar dan nihil dengan jumlah SPT yang disampaikan.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Aturan tentang tarif PTKP terbaru yang saat ini berlaku adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Sebelum keluar tentang aturan tarif PTKP pengganti, maka otomatis yang digunakan adalah aturan yang terakhir keluar. Tarif PTKP 2017 maupun PTKP 2018 masih mengacu pada aturan lama yaitu PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Dari tahun ke tahun tarif PTKP tidak selalu sama, PTKP 2016 naik sebesar 50% dibandingkan dengan PTKP 2015. Kenaikan PTKP 2016 dapat dikatakan cukup cepat mengingat pada tahun 2015 pemerintah menaikkan besarnya tarif PTKP. Kenaikan tersebut didasarkan pada pertimbangan pemerintah, seperti adanya perlambatan ekonomi, perlunya meningkatkan daya beli masyarakat serta bentuk penyesuaian dengan kenaikan upah minimum regional (UMR).

Kenaikan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menyebabkan terjadinya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena lebih sedikit pajak yang dikenakan. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena dengan sedikit pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak taat dalam membayar pajak. (F, 2013)

Tabel 2. 1. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2015	Tahun 2016
Diri WP Orang Pribadi	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00	Rp54.000.000,00
Tambahan untuk WP Kawin	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00	Rp58.500.000,00
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00	Rp54.000.000,00
Tambahan untuk setiap tanggungan *untuk tanggungan maksimal 3	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00	Rp4.500.000,00

Secara statistik Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh Pasal 21, dimana ketika PTKP mengalami kenaikan maka penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21 mengalami penurunan.(Susanti & Andi, 2018)

Sedangkan kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena dengan sedikit pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak taat dalam membayar pajak. (F, 2013)

Variabel operasional dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada penelitian ini diukur dengan mengadopsi instrument yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2015) dimana varibel ini diukur berdasarkan persentase perbandingan kenaikan penerimaan pajak setelah peningkatan PTKP dengan penerimaan pajak sebelum peningkatan PTKP.

d. Kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2

Faktor keempat yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu kebijakan *sunset policy* jilid 2. *Sunset Policy* adalah kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 28 Tahun 2007 sebagai pemberian fasilitas kepada wajib pajak perorangan maupun badan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa Bungan atas keterlambatan pelunasan hutang pajak.

Sunset Policy Jilid II yang juga disebut-sebut sebagai *Reinventing Policy*. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan, baik yang telah

maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, apabila pada tahun 2015 Wajib Pajak menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT untuk lima tahun ke belakang akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak. (Ariyanti, 2015)

Sunset policy berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Jika pajak atas terutang dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan WP Badan meningkat maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan juga. (Mangunsong, 2009)

Variabel operasional dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada penelitian ini diukur dengan mengadopsi instrument yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2015) dimana varibel ini diukur berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

C. Analisis Regresi Linear

Regresi adalah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan (model) antara dua variable atau lebih. Dalam analisis regresi terdapat 2 jenis variable yaitu:

- a. Variabel respon disebut dengan variable dependen yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan variabel Y .

b. Variabel Prediktor disebut juga dengan variable independen yaitu variable yang bebas atau tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan X .

Untuk mempelajari hubungan-hubungan antara variable bebas maka regresi linier terdiri dari dua bentuk, yaitu:

a. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana merupakan hubungan antara dua variable yaitu variabel bebas (variabel independent) dengan variabel terikat (variabel dependen). Regresi linier sederhana hanya memiliki satu peubah X yang dihubungkan dengan satu peubah tidak bebas Y . Bentuk model regresi linier sederhana:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien X

X = Variabel Bebas

Bentuk umum dari persamaan regresi linier dugaan adalah

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat

X = Variabel Bebas

$a = \hat{\beta}_0$ = estimator Intercep

$b = \hat{\beta}_1$ = estimator Koefisien Regresi Variabel Bebas

Koefisien persamaan a dan b dapat ditentukan dengan metode kuadrat terkecil, yaitu cara yang dipakai untuk menentukan persamaan a dan b dari jumlah pangkat dua antara titik-titik dengan garis regresi yang dicari terkecil. Sehingga dapat ditentukan:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y - (\sum Y_i)(\sum X_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

b. Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu variabel bebas. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas nilai X .

Bentuk model regresi linier berganda untuk populasi adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Di mana $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$ adalah koefisien atau parameter model.

Keterangan :

$i = 1, 2, \dots, n$

n = ukuran sampel

ε = galat

1. Estimasi Parameter

Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linear adalah metode kuadrat terkecil atau sering juga disebut metode *ordinary least square* (OLS). Metode ini bertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat error. Penaksiran OSL untuk β adalah sebagai berikut (Draper & Smith, 1992)

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Dimana,

$$\hat{\beta}_{((k+1)x_1)} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \dots \\ \hat{\beta}_k \end{bmatrix}, y_{(nx_1)} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_k \end{bmatrix}, X_{(nx(k+1))} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \dots & x_{k1} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \dots & x_{k2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & x_{k3} \\ 1 & x_{1n} & x_{2n} & \dots & x_{k4} \end{bmatrix}$$

Keterangan:

y = vektor variabel tidak bebas berukuran $n \times 1$

X = matrik variabel bebas berukuran $n \times (k + 1)$

$\hat{\beta}$ = vektor estimator berukuran $(k + 1) \times 1$

p = banyaknya parameter model regresi $(k + 1)$

k = banyaknya variabel bebas

n = banyaknya data

a. Uji Distribusi F

Uji distribusi F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independent terhadap variabel dependen serta untuk mengetahui signifikansi koefisien determinasi R^2 . Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F dengan cara sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1: \text{setidaknya terdapat satu dari } \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k \neq 0$$

(Mendenhall et al., 2009)

- b) Menentukan tingkat signifikansi
- c) Menentukan statistik uji

$$F = \frac{\frac{ESS}{n-k}}{\frac{RSS}{n-k}} = \frac{\frac{R^2}{k-1}}{1 - \frac{R^2}{n-k}}$$

Dengan :

ESS = *explained sum square*

RSS = *residual sum square*

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah pengamatan

k = jumlah parameter yang diestimasi

- d) Menentukan daerah penolakan H_0

H_0 ditolak bila $F > F_{(\alpha;p-1,n-p)}$

Dengan $F_{(\alpha;p-1,n-p)}$ disebut *F table*

Dapat juga digunakan daerah penolakan lainnya, yaitu

nilai peluang (Sig.) < tingkat signifikansi, maka H_0 ditolak

- e) Menarik kesimpulan

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Artinya variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel terikat, demikian sebaliknya. (Silalahi et al., 2014)

- 2) Uji Distribusi t

- a) Merumuskan hipotesis

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$H_I: \beta_k \neq 0$ untuk $k = 1, 2, \dots, p - 1$ (Neter et al., 1983)

- b) Menentukan tingkat signifikansi

- c) Menentukan statistik uji

$$t = \frac{b_k}{s(b_k)}$$

Dengan:

b_k adalah nilai taksiran parameter β_k

$s(b_k)$ adalah standar deviasi nilai taksiran parameter β_k

- d) Menentukan daerah penolakan H_0

H_0 ditolak bila $t > t_{(\frac{\alpha}{2}, n-p)}$ atau $t < -t_{(\frac{\alpha}{2}, n-p)}$

Dengan $t_{(\frac{\alpha}{2}, n-p)}$ disebut t_{tabel}

Dapat juga digunakan daerah penolakan lainnya, yaitu

nilai peluang (Sig.) < tingkat signifikansi, maka H_0 ditolak

- e) Menarik kesimpulan

Jika H_0 ditolak maka terdapat pengaruh secara parsial (individu) variabel bebas terhadap variabel terikatnya. (Silalahi et al., 2014)

2. Korelasi

Korelasi adalah hubungan linier antara dua variabel atau lebih dari suatu data pengamatan. Hubungan yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan, terutama untuk data kuantitatif disebut koefisien korelasi. Koefisien

korelasi disimbolkan dengan “r”. Perhitungan koefisien korelasi dapat dicari menggunakan rumus berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{nX_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

3. Korelasi Ganda

Untuk melihat besarnya korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat, maka dapat dihitung dari koefisien korelasi gandanya. Koefisien korelasi ganda dapat dihitung dengan:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y - \hat{Y})^2}{(\sum(Y - \hat{Y}))^2}, \text{ dengan } R^2 \text{ koefisien determinasi.}$$

4. Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan sebagai ukuran suatu hubungan dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Koefisien korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas disimbolkan dengan r_{yj} , dapat dicari dengan rumus :

$$r_{yj} = \frac{n \sum X_{ji} Y_i - (\sum X_{ji})(\sum Y_i)}{\sqrt{\{nX_{ji}^2 - (\sum X_{ji})^2\}\{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Dimana $i = 1, 2, \dots, n$ dan $j = 1, 2, \dots, k$

5. Uji Asumsi

Uji asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis regresi adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model

regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Metode yang dapat dipakai untuk uji normalitas antara lain, analisis grafik dan analisis statistik (Nurlaela, 2017).

Uji Normalitas dapat dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, dan uji korelasi yang dapat dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara residual e_i dan nilai harapan dibawah normalitas. Nilai koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan normalitas (Kutner et al., 2005).

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. Normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi aumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara residual deret waktu pada titik waktu yang berbeda. Kasus khusus dimana residu selang waktu satu periode (pada waktu t dan $t + 1$) berkorelasi disebut orde satu

autokorelasi. Secara umum, autokorelasi orde ke- m terjadi Ketika residu pada kali t dan $(t + m)$ berkorelasi. (Mendenhall & Sincich, 2012).

Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson.

Durbin-Watson statistik d dapat dihitung sebagai berikut:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{\epsilon}_t - \hat{\epsilon}_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^n \hat{\epsilon}_t^2}$$

Statistik d memiliki sifat-sifat seperti berikut:

- 1) Rentang d : $0 \leq d \leq 4$
- 2) Jika residual tidak berkorelasi, $d \approx 2$.
- 3) Jika residual berkorelasi positif, $d < 2$, dan jika berkorelasi positif dengan kuat maka $d \approx 0$.
- 4) Jika residual berkorelasi negatif, $d > 2$, dan jika berkorelasi negative dengan kuat maka $d \approx 4$.

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat dua atau lebih variabel independent yang digunakan dalam regresi yang berkorelasi sedang atau tinggi (Mendenhall & Sincich, 2012).

Multikolinearitas dalam model regresi $E(y) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k$ dapat dideteksi dengan melihat indikator berikut:

- 1) Korelasi yang signifikan antara pasangan variabel independen
 - 2) Uji distribusi t tidak signifikan untuk semua (hampir semua) parameter β . Ketika uji distribusi F untuk model $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$ bernilai signifikan.
 - 3) Adanya tanda berlawanan pada parameter yang diperkirakan.
 - 4) Nilai VIF untuk parameter β lebih besar dari 10, dimana $(VIF)_i = \frac{1}{1-R_i^2}$, $i = 1, 2, \dots, k$ dan R_i^2 adalah koefisien determinasi dari model $E(x_i) = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_{i-1} x_{i-1} + \alpha_{i+1} x_{i+1} + \dots + \alpha_k x_k$
- d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian yang tidak homogen untuk variabel independen dari sebuah observasi ke observasi lainnya (Mendenhall & Sincich, 2012). Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengukur apakah terjadi ketidakaksamaan varians residual (heteroskedastisitas) dari data-data pengukuran. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melakukan uji Park, uji Glejser, uji Breusch-Pagan, dan uji White.

6. Pemilihan Model Terbaik dengan Metode *Backward*

Metode *Backward* merupakan metode langkah mundur, dimana semua variabel X (variabel bebas) diregresikan dengan variabel Y . Pengeleliminasi variabel X didasarkan pada nilai $F_{parsial}$ terkecil dan turut tidaknya variabel

X pada model juga ditentukan oleh nilai F_{tabel} . Metode *Backward* merupakan metode yang baik dikarenakan dalam proses pengeliminasian dijelaskan perilaku variabel terikat dengan sebaik-baiknya dengan memilih variabel bebas dari sekian banyak variabel bebas yang tersedia dalam data.(Desrina et al., 2013)

Langkah-langkah pemilihan model terbaik dengan metode *Backward* menggunakan Program R untuk n variabel X .

- 1) Mendefinisikan variabel terikat Y dan variabel bebas X
- 2) Melakukan uji asumsi klasik
- 3) Estimasi parameter: Uji distribusi F dan uji distribusi t
- 4) Uji Koefisien determinasi
- 5) Analisis pemilihan model terbaik dengan Metode *Backward* menggunakan Program R
 - a. Membuat model utuh yang terdiri dari seluruh variabel
 - b. Mencari koefisien determinasi parsial atau variabel X yang memiliki korelasi terkecil terhadap Y . Buatlah model yang masing-masing menguji korelasi variabel bebas terhadap variabel Y . Masing-masing model diuji anova-nya untuk melihat nilai JKR dan JKG pada *output* Anova. Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk melihat masing-masing variabel bebas dengan nilai r terkecil yang akan dikeluarkan.

$$r = \frac{JKR}{JKG}$$

c. Melakukan Uji Hipotesis terhadap variabel dengan koefisien determinasi terkecil (kandidat variabel yang akan dikeluarkan)

- $H_0 : \beta_{X\text{terpilih}} = 0$
- $H_1 : \beta_{X\text{terpilih}} \neq 0$
- Taraf nyata : α
- Statistik uji : $F_{hit} = \frac{JKR}{1} : \frac{JKG}{n-1}$
- Kriteria keputusan : H_0 ditolak jika $F_{hit} > F_{\alpha(1,n-p)}$
- Kesimpulan

Jika H_0 diterima maka variabel dengan koefisien korelasi kecil terhadap X dikeluarkan dari model dan akan terbentuk model baru.

d. Melakukan Uji Hipotesis terhadap model baru

e. Lakukan tahap b dan c hingga tersisa variabel X yang memiliki korelasi berarti terhadap variabel Y

D. Program R

Program R atau R *Studio* adalah perangkat lunak (*software*) yang dirancang secara khusus untuk mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan statistik. Program R hampir sama dengan SPSS. R merupakan satu kesatuan *software* yang terintegrasi dengan beberapa fasilitas untuk manipulasi, perhitungan, dan penampilan grafik.

Layout RStudio terdiri dari 4 jendela yaitu:

1. Editor

Jendela ini berfungsi untuk membuat *script R*. *Script R* adalah suatu kode yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah di R. Cara untuk membuka Editor adalah : Klik tab File → New File → R *script*

2. *Console*

Console memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengeksekusi perintah dari *script R* yang dibuat. Jendela ini akan menampilkan hasil atau *output* dari setiap baris *command R* yang dijalankan.

3. *Environment*

Jendela ini terdiri dari beberapa tab, yaitu *Environment*, *History*, dan *Connections*. Tab *environment* akan menampilkan *summary* dari input.

4. *Fitur Lainnya*

Jendela ini merupakan fitur tambahan yang bermanfaat dalam manajemen *file*, menampilkan *command output* berupa plot, informasi, dan bantuan dalam penulisan *script*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Praktik Kerja Lapangan

Lokasi yang digunakan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Panembahan Senopati No 20, Yogyakarta.

B. Desain Praktik Kerja Lapangan

Desain Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta adalah magang yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu tentang penggunaan ilmu matematika dalam dunia kerja. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada semester ganjil Universitas Negeri Yogyakarta yaitu pada tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020.

C. Objek Praktik Kerja Lapangan

Objek Praktik Kerja Lapangan (PKL) disesuaikan dengan posisi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta yaitu pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Pada seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama mengurus proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengambilan data guna memenuhi kebutuhan analisis PKL dilakukan dengan cara mengambil data sekunder di seksi Pengolahan Data dan Informasi.

E. Instrumen Praktik Kerja Lapangan

Instrumen yang digunakan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta antara lain komputer, *printer*, mesin *foto copy*, mesin *scan*, internet, *software microsoft word*, *microsoft excel*, data hasil observasi, website pelaporan pajak seperti *e-filling*, *e-form*, *e-billing*, *Apportal*, *efin*, serta DJP Online dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Berikut langkah-langkah memilih model terbaik menggunakan metode *backward*:

1. Mengolah data jumlah Wajib Pajak Orang Pajak yang membayar, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, jumlah SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Lebih Bayar dan Nihil, jumlah SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah realisasi Penerimaan PPh 21. Target penerimaan PPh 21, dan jumlah penerimaan PPh 21 pada kuartal ke-2 yang didapatkan dari KPP Pratama Yogyakarta berdasarkan rumus yang telah ditentukan menjadi data untuk variabel penerimaan pajak Orang Pribadi, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, kenaikan PTKP, dan kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2.

2. Melakukan normalisasi data
3. Melakukan pemilihan model terbaik menggunakan metode *Backward* dengan melihat nilai AIC dilakukan hingga mendapatkan model terbaik dengan menggunakan bantuan program R.
4. Melakukan uji parameter yaitu uji distribusi F dan uji parsial t dengan bantuan program R.
5. Melakukan uji koefisien determinasi dengan melihat nilai R^2 dengan bantuan program R.
6. Melakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dengan bantuan program R.
7. Melakukan interpretasi model regresi terbaik

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Penulis menjalani praktik kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2020 s.d. 13 Februari 2020. Kegiatan PKL berlangsung selama 23 hari kerja yaitu hari Senin s.d. Jumat sejak pukul 8.00 WIB s.d. 16.00.

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama menjalani kegiatan praktik kerja lapangan antara lain: membantu sub-bagian umum KPP Pratama Yogyakarta untuk meng-input dan merapikan surat masuk dan surat keluar, membantu kegiatan pelaporan SPT Tahunan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, mengikuti kegiatan tambahan seperti olahraga di Jumat pagi sesuai ketentuan kegiatan yang berlaku di KPP Pratama Yogyakarta.

Perkembangan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama selama tahun 2010 s.d. 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data Penerimaan Pajak dan Target Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Target Pajak Penghasilan Orang Pribadi *
2010	171.825.748.437	352.040.005.000
2011	225.247.393.092	352.040.005.000
2012	249.384.493.763	352.040.005.000
2013	247.050.155.556	352.040.005.000
2014	290.080.135.684	352.040.005.000

2015	323.130.629.609	352.040.005.000
2016	285.136.568.611	369.188.912.000
2017	302.341.396.842	420.358.358.000
2018	354.218.751.485	424.992.236.000
2019	396.311.793.007	381.932.944.000

*target pajak penghasilan Orang Pribadi tahun 2010-2014 tidak tersedia di Aportal KPP Pratama Yogyakarta sehingga target pajak penghasilan Orang Pribadi menggunakan target pajak penghasilan Orang Pribadi tahun 2015.

B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penerimaan pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama, dengan faktor-faktornya yaitu pemeriksaan Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh kenaikan tarif PTKP, dan kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2. Untuk menyelidiki faktor tersebut akan dilakukan proses olah data dengan melakukan standarisasi data kemudian dilakukan uji asumsi klasik dan mencari model terbaik menggunakan metode *Backward*.

Tabel berikut merupakan tabel data penerimaan pajak Orang Pribadi yang dihitung dengan rumus rasio jumlah penerimaan pajak pribadi pada tahun i dengan jumlah penerimaan pajak pribadi tahun $i+1$ dikali dengan 100%, beserta variabel bebas kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, kenaikan tarif PTKP, dan Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2 yang telah diolah sesuai rumus yang telah ditetapkan pada landasan teori.

Tabel 4. 2. Hasil Olah Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Yogyakarta

Tahun	Penerimaan Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemeriksaan Pajak	Kenaikan Tarif PTKP	Kebijakan <i>Sunset</i> <i>Policy</i> Jilid 2
2010	77%	0,085074337	0,908131131	7107,55%	49%
2011	85%	0,085853036	0,906849105	1808,67%	64%
2012	95%	0,085530422	0,902960612	45,14%	71%
2013	86%	0,095182246	0,938676084	9,68%	70%
2014	88%	0,088912975	0,97284204	16,32%	82%
2015	97%	0,093845502	0,975586148	30,80%	92%
2016	97%	0,112164365	0,974881288	-1,70%	77%
2017	91%	0,109018061	0,97403702	-6,43%	72%
2018	91%	0,119292979	0,966090252	24,23%	83%
2019	122%	0,114836007	0,965838709	31,08%	104%

Dikarenakan data memiliki satuan yang berbeda, sehingga diperlukan untuk melakukan normalisasi data atau standarisasi data. Serta untuk memudahkan proses analisis data, maka variabel dilambangkan seperti berikut

Y = Penerimaan pajak Orang Pribadi

X_1 = Kepatuhan Wajib Pajak

X_2 = Pemeriksaan pajak

X_3 = Kenaikan tarif PTKP

$$X_4 = \text{Kebijakan Sunset Policy Jilid 2}$$

Berikut merupakan tabel data yang telah dilakukan normalisasi data dan menggunakan lambang variabel yang telah ditetapkan.

Tabel 4. 3. Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Yogyakarta Hasil Normalisasi

Tahun	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
2010	-1,333828784	-1,033461382	-1,292455574	2,755615264	-1,804785386
2011	-0,662719962	-0,975551383	-1,33341057	0,400892327	-0,816764189
2012	0,176166066	-0,999543421	-1,457630527	-0,382787346	-0,355687631
2013	-0,578831359	-0,281760138	-0,316680956	-0,398545105	-0,421555711
2014	-0,411054154	-0,747990969	0,77476851	-0,395594413	0,368861247
2015	0,343943271	-0,381170622	0,862430486	-0,389159773	1,027542045
2016	0,343943271	0,981159817	0,839913361	-0,403602164	0,039520848
2017	-0,159388345	0,747176643	0,812942775	-0,405704087	-0,289819551
2018	-0,159388345	1,511297951	0,559079085	-0,392079358	0,434729327
2019	2,441158341	1,179843503	0,551043411	-0,389035346	1,817959002

1. Penyusunan Model Regresi dengan Metode Backward

Dilakukan penyusunan model terbaik dengan memasukan seluruh variabel yang ada kedalam model regresi dugaan, kemudian uji pemilihan model terbaik metode *Backward* dilakukan dengan melihat nilai AIC pada masing-masing variabel yang ada. Pada setiap step/langkah terdapat batas minimal nilai AIC yang harus dipenuhi oleh masing-masing variabel, jika nilai AIC variabel lebih kecil dari nilai AIC model pada suatu step, maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model.

Tabel 4. 4. Step 0 Uji AIC Metode Backward

Step 0: AIC =19.73038			
Variabel	AIC	R²	Adj R²
X1	21.056	0.852	0.705
X2	22.780	0.803	0.650
X3	18.187	0.766	0.779
X4	32.049	0.410	0.115

Isi lengkap dari tabel 4.4 dapat dilihat di lampiran. Berdasarkan tabel step 0 untuk uji metode *Backward* dengan nilai AIC 19.73038 di atas dapat dilihat bahwa variabel X3 memiliki nilai AIC terkecil yaitu 18.187, sehingga dikeluarkan dari model.

Selanjutnya dilakukan uji AIC tahap selanjutnya untuk melihat variabel yang akan dikeluarkan dari model.

Tabel 4. 5. Step 1 Uji AIC Metode Backward

Step 1: AIC =18.18679			
Variabel	AIC	R²	Adj R²
X1	19.365	0.797	0.739
X2	21.413	0.751	0.680
X4	31.481	0.319	0.125

Isi lengkap tabel 4.5 dapat dilihat di lampiran. Berdasarkan hasil step 1 tidak ada variabel yang memiliki nilai AIC lebih kecil dari nilai AIC model, sehingga pada tahap ini tidak ada variabel yang dikeluarkan dari model.

Dari hasil stepwise menggunakan metode *Backward* diperoleh model yang optimal yaitu dengan variabel independen $X1$, $X2$ dan $X4$. Model regresi dugaan terbaik yang terbentuk dengan melakukan perintah *summary* model pada program R didapatkan sebagai berikut,

Tabel 4. 6 Model Regresi

Intersept	Koefisien		
	$X1$	$X2$	$X3$
-1.933E-11	3.28e-01	-5.128e-01	1.035e

Berdasarkan pada output diatas maka didapatkan persamaan regresi dugaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,933 \times 10^{-11} + 3,285 \times 10^{-1} X1 - 5,128 \times 10^{-1} X2 + 1,035 X4$$

2. Uji Hipotesis F

Pengujian hipotesis F dilakukan untuk mengetahui apakah secara keseluruhan parameter signifikan dalam model. Berikut tabel hasil uji hipotesis F terhadap model yang telah dibentuk.

Tabel 4. 7 Uji F

Metode	F-Statistik	P-Value
ANOVA	11.56	0.006621

Berdasarkan output dari hasil uji F pada penelitian ini didapatkan nilai F statistik sebesar 11.56 dengan angka signifikansi (*P-value*) sebesar 0,02347. Dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (*P-value*) sebesar $0,02347 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel $X1$, $X2$ dan $X4$ mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel Y .

3. Uji Hipotesis t

Pengujian ini bertujuan untuk melihat pengaruh signifikan variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut tabel hasil uji hipotesis t.

Tabel 4. 8 Uji t

Variabel	X1	X2	X4
t-value	1.498	12.029	4.658
p-value	0.18471	0.08874	0.00348

Berdasarkan output diatas, adapun hipotesis hasil uji t diperoleh sebagai berikut

1. Variabel X1

- $H_0 : \beta = 0$, variabel X1 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y.
- $H_0 : \beta \neq 0$, variabel X1 mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y.

Pada variabel X1 dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (P Value) sebesar $0,18471 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 diterima atau berarti variabel X1 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

2. Variabel X2

- $H_0 : \beta = 0$, variabel X2 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y.
- $H_0 : \beta \neq 0$, variabel X2 mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y.

Pada variabel X2 dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (P Value) sebesar $0,08874 > 0,05$. Atas dasar

perbandingan tersebut, maka H_0 diterima atau berarti variabel $X2$ tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y .

3. Variabel $X3$

- $H_0 : \beta = 0$, variabel $X3$ tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y .
- $H_0 : \beta \neq 0$, variabel $X3$ mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y .

Pada variabel $X3$ dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (P Value) sebesar $0,00348 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel $X3$ mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y .

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independent $X1$, $X2$ dan $X4$ dapat menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinasi

Metode	R^2
Uji ANOVA	0.8525

Berdasarkan *output* diatas dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0.8525 atau 85,25%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen $X1$, $X2$ dan $X4$ dapat menjelaskan variabel dependen Y sebesar 85,25%, sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor lain di luar variabel yang tidak diteliti.

5. Uji Asumsi

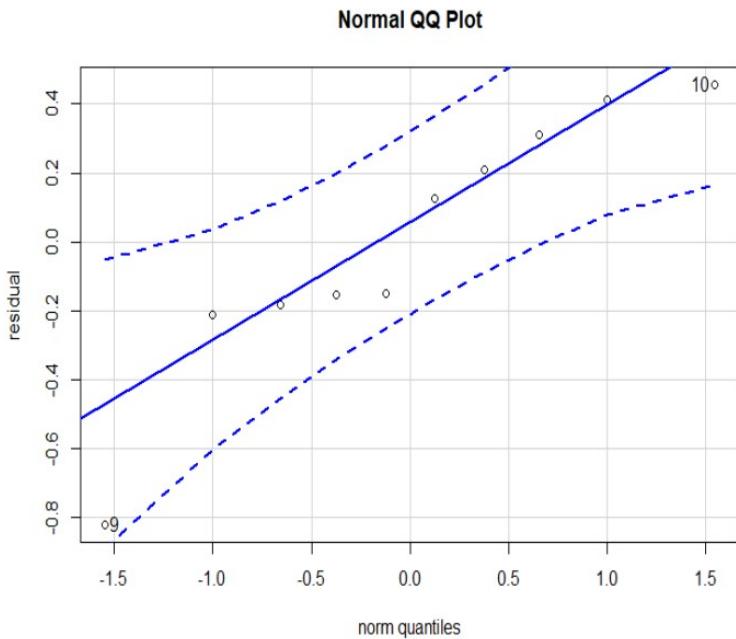
- Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari *scatterplot*, dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari regresi atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. 10 Uji Normalitas

Metode	P-Value
Uji Jarque Bera	0.6201

Berdasarkan *output* uji normalitas menggunakan uji *Jarque Bera test* diperoleh nilai *p-value* sebesar 0.6201 artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4. 1 Plot Uji Normalitas

- Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel-variabel independent dalam persamaan regresi mempunyai korelasi erat satu sama lain. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independent. Model regresi yang baik harus terbebas dari multikolinearitas untuk setiap variabel independennya. Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas dengan variabel lainnya. Sebaliknya jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 11 Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
$X1$	1.955689
$X2$	2.597298

X4	2.006933
----	----------

Berdasarkan output di atas dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas. Hasil perhitungan *VIF* juga menunjukkan bahwa nilai *VIF* masing-masing variabel kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.

- Autokorelasi

Tujuan dilakukan uji Autokorelasi adalah untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan penganggu pada periode t-1. Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari autokorelasi.

Tabel 4. 12 Uji Autokorelasi

Metode	P-Value
Uji Durbin-Watson	0.5942

Berdasarkan tabel uji autokorelasi pada output diatas diperoleh bahwa pada nilai p-value sebesar 0.5942 artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi.

- Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari heteroskedastisitas. Untuk mengenali apakah model terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan uji *Breusch-Pagan*, jika *p-value* yang didapatkan lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka model tidak mengalami heteroskedastisitas. Namun, jika nilai *p-value*

kurang dari taraf signifikansi 0,05 maka model mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 4. 13 Uji Heteroskedastisitas

Metode	P-Value
Uji Breusch-Pagan	0.5748

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas pada output diatas diperoleh bahwa pada nilai p-value sebesar 0.5748 artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

6. Interpretasi Model

Tabel 4. 14 Model Regresi

Intersept	Koefisien		
	X1	X2	X3
-1.933E-11	3.28e-01	-5.128e-01	1.035e

Berdasarkan pada output diatas maka didapatkan persamaan regresi dugaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,933 \times 10^{-11} + 3,285 \times 10^{-1} X_1 - 5,128 \times 10^{-1} X_2 + 1,035 X_4$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil persamaan regresi diatas, diperoleh nilai konstanta sebesar $-1,933 \times 10^{-11}$. Hal tersebut berarti, apabila kondisi variabel kepatuhan Wajib Pajak (X_1), pemeriksaan pajak (X_2) dan kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2 (X_4) dianggap konstan, maka variabel penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta (Y) yang dihasilkan adalah sebesar $-1,933 \times 10^{-11}$.

2. Nilai $3,285 \times 10^{-1}$ pada variabel kepatuhan Wajib Pajak (X_1) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak (X_1) memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta (Y). Artinya jika kenaikan satu-satuan variabel kepatuhan Wajib Pajak (X_1) maka mengakibatkan variabel penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta (Y) meningkat sebesar $3,285 \times 10^{-1}$.
3. Nilai $-5,128 \times 10^{-1}$ pada variabel pemeriksaan pajak (X_2) adalah bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak (X_2) pemeriksaan pajak memiliki hubungan negatif terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta (Y). Artinya jika kenaikan satu-satuan variabel pemeriksaan pajak (X_2) maka mengakibatkan variabel penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta (Y) meningkat sebesar $-5,128 \times 10^{-1}$.
4. Nilai 1,035 pada variabel kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2 (X_4) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2 (X_4) memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta (Y). Artinya jika kenaikan satu-satuan variabel kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2 (X_4) maka mengakibatkan variabel penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta (Y) meningkat sebesar 1,035.

Sehingga didapatkan model terbaik untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta adalah kepatuhan wajib pajak (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2 (X_4). Sedangkan kenaikan PTKP (X_3) tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi secara signifikan (Y).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan analisis regresi dengan metode *Backward* pada penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta dengan faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, kenaikan PTKP, dan kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2 dilakukan dengan beberapa langkah yaitu langkah pertama susun model regresi dugaan dengan memasukkan seluruh variabel yang ada, keada mengeluarkan satu per satu variabel yang memenuhi kondisi, variabel yang dikeluarkan adalah variabel yang memiliki nilai AIC terkecil dari model dan didapatkan variabel X_3 atau pengaruh kenaikan PTKP sebagai variabel yang dikeluarkan dari model, langkah ketiga dilakukan estimasi parameter menggunakan uji F dan t, melakukan uji koefisien determinasi, selanjutnya dilakukan uji asumsi, dimana model terbaik yang terbentuk memenuhi uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas, dan langkah terakhir yaitu interpretasi model.
2. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam pembahasan didapatkan variabel kepatuhan wajib pajak, variabel pemeriksaan pajak, dan variabel kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2 adalah faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan variabel pengaruh kenaikan PTKP tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta dan faktor pengaruh kenaikan PTKP dikeluarkan dari persamaan model regresi linear berganda.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi KPP Pratama Yogyakarta

KPP Pratama Yogyakarta beserta Direktorat Jendral Pajak harus mampu mengajak Wajib Pajak untuk membayar pajak dan lapor SPT Tahunan.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi harus meningkatkan kesadaran diri untuk membayar pajak dan lapor SPT Tahunan dikarenakan pajak yang kita bayar akan kita rasakan meski tidak secara langsung.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode pemilihan model terbaik dan lebih banyak menggunakan variabel lain agar semakin banyak faktor-faktor yang dapat diketahui dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, F. (2015, April 23). *Ditjen Pajak Tak Jera Terapkan Sunset Policy*. Bisnis Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2218849/ditjen-pajak-tak-jera-terapkan-sunset-policy>
- Desideria, E., & Ngadiman. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 355–363.
- Desrina, R., Mardiningsih, & Bu'ulolo, F. (2013). MENENTUKAN MODEL PERSAMAAN REGRESI LINIER BERGANDA DENGAN METODE BACKWARD (Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Tanah Karo). *Saintia Matematika*, 1(3), 285–297.
- Draper, N., & Smith, H. (1992). *Analisis Regresi Terapan* (Second). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- F, N. E. E. (2013). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SETELAH PEMBERLAKUAN KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK. In *Jurnal Akuntansi AKUNESA* (Vol. 1, Issue 2).
- Harlan, J. (2018). *ANALISIS REGRESI LINEAR* (Pertama). Penerbit Gunadarma.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*.
- Keuangan, K. (2020a). *Bagaimana negara menggunakan uang pajak Anda dalam APBN 2020?* <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>
- Keuangan, K. (2020b). *Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019.* <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>
- Komarawati, R. D., & Mukhtaruddin. (2012). ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK DI KABUPATEN LAHAT. In *Jurnal InFestasi* (Vol. 8, Issue 1).

- Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Mangunsong, S. (2009). PENGARUH SUNSET POLICY DALAM PENERIMAAN PAJAK Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama "X" di Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 1, 85–100.
- Mardiasmo. (2018). *Perpjakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Materi Perpjakan Umum, Pahami dan Ketahui Bidang Pajak Lebih Jauh*. (n.d.). Retrieved December 2, 2020, from <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/materi-perpjakan-umum-pahami-bidang-pajak-lebih-jauh/>
- Mendenhall, W., Beaver, R. J., & Beaver, B. M. (2009). *Introduction to Probability and Statistics* (13th ed.). BROOKS/COLE CENGAGE Learning.
- Mendenhall, W., & Sincich, T. (2012). *A Second Course in Statistics Regression Analysis* (Seventh). Pearson Education, Inc.
- Molle, A., Pangemanan Sabijono Analisis Faktor-Faktor, S. H., Indah Molle, A., Pangemanan, S. S., Sabijono, H., & Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, F. (2014). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MANADO. 2, 108–115.
- Neter, J., Wasserman, W., & Kutner, M. H. (1983). *Applied Linear Regression Models*. RICHARD D. IRWIN, INC.
- Nurlaela. (2017). *PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2006-2015*. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- onlinepajak. (2018, October 15). *Peranan Pajak dalam Kebijakan Fiskal*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/kebijakan-fiskal>
- Ramli. (2006). ANALISIS PERUBAHAN PTKP TERHADAP PENERIMAAN PPH 21 DAN EKONOMI . *Jurnal Wawas*, 11.
- Redaksi DDTCTNews. (2019, August 20). Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhan? Cek di Sini. *DDTC Trusted Indonesian Tax News Portal*. <https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya->

cek-di-sini-16815?page_y=1700

- Saputro, H. (2013). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN FORMAL OLEH WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA). *EKONOMIA*, 1(1), 152–155.
- Silalahi, D., Sitepu, R., & Tarigan, G. (2014). ANALISIS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN METODE REGRESI DATA PANEL. *Saintia Matematika*, 02, 03.
- Susanti, N., & Andi, A. (2018). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(2), 213.
- Wulandari, R. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA. *Perbanas Review*, 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kegiatan

Nama Instansi Tempat PKL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Panembahan Senopati No.20, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta Kode Pos 55121. Telpon (0274) 380415 atau 373403, Fax = 380417
Nama/Nomor Mahasiswa : Maya Maryanah/17305144008
Program Studi : Matematika
Lama Praktik : 4 minggu/ 13 Januari 2020 s.d. 12 Februari 2020

no	Hari, Tanggal	Kegiatan	Jam
1.	Senin, 13 Januari 2020	1. Pengenalan tempat PKL 2. Pembuatan absensi kehadiran PKL	07.30-16.00
2.	Selasa, 14 Januari 2020	1. Input data surat keluar tahun 2007-2009	07.30-16.00
3.	Rabu, 15 Januari 2020	1. Input data surat keluar tahun 2010-2012 2. Meeting mengenai laporan SPT Tahunan	07.30-16.00
4.	Kamis, 16 Januari 2020	1. Input data surat masuk 2013-2015	07.30-16.00
5.	Jumat, 17 Januari 2020	1. Input data surat masuk 2015-2016	07.30-16.00
6.	Senin, 20 Januari 2020	1. Input data surat disposisi 2. Sosialisasi teknis lapor SPT Tahunan	07.30-16.00
7.	Selasa, 21 Januari 2020	1. Mempelajari mengenai teknis pelaporan SPT 2. Mempelajari mengenai <i>effin</i>	07.30-16.00
8.	Rabu, 22 Januari 2020	1. Pengenalan alat bantu lapor SPT Tahunan	07.30-16.00
9.	Kamis, 23 Januari 2020	1. Pembagian dan pengenalan Bidang Pengawasan dan Konsultasi 2. Membantu mengurus surat di WASKON 1	07.30-16.00
10.	Jumat, 24 Januari	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian	07.30-16.00

	2020	registrasi	
11.	Senin, 27 Januari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian pembuatan <i>effin</i>	07.30-16.00
12.	Selasa, 28 Januari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian <i>e-filling</i>	07.30-16.00
13.	Rabu, 29 Januari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian pensiunan	07.30-16.00
14.	Kamis, 30 Januari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian badan usaha	07.30-16.00
15.	Jumat, 31 Januari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian registrasi 2. Mengurus surat masuk di WASKON 1	07.30-16.00
16.	Senin, 3 Februari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian <i>effin</i> 2. Pelayanan SPT Tahunan bagian <i>e-billing</i>	07.30-16.00
17.	Selasa, 4 Februari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian <i>e-filling</i> 2. Mengurus surat masuk di WASKON 1	07.30-16.00
18.	Rabu, 5 Februari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian <i>e-filling</i> 2. Mengurus surat keluar di WASKON 1	07.30-16.00
19.	Kamis, 6 Februari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian <i>effin</i> 2. Merapikan berkas di ruang arsip	07.30-16.00
20.	Jumat, 7 Februari 2020	1. Olahraga bersama Staff KPP Pratama Yogyakarta 2. Pelayanan SPT Tahunan bagian pensiunan	07.30-16.00
21.	Senin, 10 Februari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian <i>effin</i> 2. Mencari referensi untuk tugas laporan PKL	07.30-16.00
22.	Selasa, 11 Februari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian <i>e-filling</i>	07.30-16.00
23.	Rabu, 12 Februari 2020	1. Pelayanan SPT Tahunan bagian <i>e-filling</i>	07.30-16.00

		2. Berfoto Bersama staff WASKON 1 3. Mengurus nilai PKL 4. Mengurus sertifikat magang di KPP Pratama Yogyakarta	
--	--	--	--

Mengetahui dan menyetujui,
a.n. Pembimbing Lapangan

Nugrahaningtyas Nevi Puspitorini
NIP. 197211301992012001

Mahasiswa



Maya Maryanah
NIM. 17305144008

Lampiran 2 Tabel Data Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Yogyakarta

Tahun Pajak	WP OP Ada Pembayaran Semua Jenis Pajak
2010	5253
2011	5781
2012	6167
2013	7304
2014	7301
2015	8199
2016	10389
2017	10666
2018	12398
2019	12664

Tahun	WP OP (semua status Aktif + NE)
2010	61746
2011	67336
2012	72103
2013	76737
2014	82114
2015	87367
2016	92623
2017	97837
2018	103929
2019	110279

Tahun Pajak	SPT LB	SPT NIHIL
2010	25	35156
2011	32	35492
2012	39	34669
2013	189	36226
2014	136	40629
2015	69	45286
2016	106	42392
2017	129	43390
2018	288	44071
2019	275	44792

Tahun Pajak	SPT WP OP
2010	38740
2011	39173
2012	38438
2013	38794
2014	41903
2015	46490
2016	43593
2017	44679
2018	45916
2019	46661

Tahun	Realisasi penerimaan PPh21
2010	171.825.748.437
2011	225.247.393.092
2012	249.384.493.763
2013	247.050.155.556
2014	290.080.135.684
2015	323.130.629.609
2016	285.136.568.611
2017	302.341.396.842
2018	354.218.751.485
2019	396.311.793.007

Tahun	Target penerimaan PPh21
2010	352.040.005.000
2011	352.040.005.000
2012	352.040.005.000
2013	352.040.005.000
2014	352.040.005.000
2015	352.040.005.000
2016	369.188.912.000
2017	420.358.358.000
2018	424.992.236.000
2019	381.932.944.000

Tahun	PPh21
2010	Rp104.370.597.281
2011	Rp135.325.163.190
2012	Rp158.782.787.407
2013	Rp166.351.398.014
2014	Rp194.074.287.699
2015	Rp221.209.922.167
2016	Rp228.435.168.031
2017	Rp235.176.618.143
2018	Rp258.940.496.417
2019	Rp284.981.789.967
2020	Rp233.534.120.938

Lampiran 3 Rumus Pengolahan Data

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang membayar}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar}}$$

2. Pemeriksaan Pajak

$$\text{Pemeriksaan pajak} = \frac{\text{Jumlah SPT yang menyatakan lebih bayar dan nihil}}{\text{Jumlah SPT yang disampaikan}}$$

3. Kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

$$\text{Prosentase Kenaikan} = \frac{\text{Kenaikan penerimaan pajak setelah peningkatan PTKP}}{\text{Penerimaan pajak sebelum peningkatan PTKP}} \times 100\%$$

4. Kebijakan *Sunset Policy* Jilid 2

$$\text{Efektivitas sunset policy} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Sedangkan variabel terikatnya yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penerimaan pajak penghasilan dapat diukur dengan rumus :

Penerimaan pajak penghasilan

$$= \frac{\text{Jumlah penerimaan pajak tahun } i \text{ kuartal } 2}{\text{Jumlah penerimaan pajak tahun } (i+1) \text{ kuartal } 2} \times 100\%$$

Lampiran 4 Script perhitungan di Program R

1. Script Uji Normalitas

```
> jarque.bera.test(residual)
    Jarque Bera Test
data: residual
X-squared = 0.95576, df = 2, p-value = 0.6201
```

2. Script Uji Multikolinearitas

```
> qqPlot(residual,distribution="norm",main="Normal QQ Plot")
```

3. Script Uji Heteroskedastisitas

```
> bptest(model, data=data)
    studentized Breusch-Pagan test

data: model
BP = 6.3861, df = 3, p-value = 0.09426
```

4. Script Uji Autokorelasi

```
> dwtest(model, data=data)
    Durbin-Watson test

data: model
DW = 2.7071, p-value = 0.5942
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

5. Script Model Regresi Berganda

```
> modelnew=lm(Y ~ X1+X2+X4, data=data)
> modelnew
Call:
lm(formula = Y ~ X1 + X2 + X4, data = data)
Coefficients:
(Intercept)          X1          X2          X4
-1.234e-15  3.285e-01 -5.128e-01  1.035e+00
```

6. Script Summary

```
> summary(modelnew)

Call:
lm(formula = Y ~ X1 + X2 + X4, data = data)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-0.81899 -0.17364 -0.01228  0.28644  0.45524 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) -1.234e-15 1.488e-01  0.000 1.00000  
X1          3.285e-01 2.193e-01  1.498 0.18471  
X2          -5.128e-01 2.527e-01 -2.029 0.08874 .  
X4          1.035e+00 2.221e-01  4.658 0.00348 ** 
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.4704 on 6 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8525,    Adjusted R-squared:  0.7787 
F-statistic: 11.56 on 3 and 6 DF,  p-value: 0.006621
```

7. Script Uji Stepwise Metode Backward

```
> BWDfit.aic<-ols_step_backward_aic(model,details=TRUE)
Backward Elimination Method
Candidate Terms:

1 . X1
2 . X2
3 . X3
4 . X4

Step 0: AIC = 19.73038
Y ~ X1 + X2 + X3 + X4

-----

| Variable | DF | AIC    | Sum Sq | RSS   | R-Sq  | Adj. R-Sq |
|----------|----|--------|--------|-------|-------|-----------|
| X3       | 1  | 18.187 | 0.059  | 1.328 | 0.852 | 0.779     |
| X1       | 1  | 21.056 | 0.500  | 1.769 | 0.803 | 0.705     |
| X2       | 1  | 22.780 | 0.833  | 2.102 | 0.766 | 0.650     |
| X4       | 1  | 32.049 | 4.042  | 5.310 | 0.410 | 0.115     |


-----  
Variables Removed:  
x X3
```

Step 1 : AIC = 18.18679
 $Y \sim X_1 + X_2 + X_4$

Variable	DF	AIC	Sum Sq	RSS	R-Sq	Adj. R-Sq
X1	1	19.365	0.497	1.824	0.797	0.739
X2	1	21.413	0.911	2.239	0.751	0.680
X4	1	31.481	4.800	6.128	0.319	0.125

No more variables to be removed.

Variables Removed:
 $x \times 3$

Final Model Output

Model Summary

R	0.923	RMSE	0.470
R-Squared	0.852	Coef. Var	-5.183031e+16
Adj. R-Squared	0.779	MSE	0.221
Pred R-Squared	0.482	MAE	0.303

RMSE: Root Mean Square Error

MSE: Mean Square Error

MAE: Mean Absolute Error

ANOVA

	Sum of Squares	DF	Mean Square	F	Sig.
Regression	7.672	3	2.557	11.558	0.0066
Residual	1.328	6	0.221		
Total	9.000	9			

Parameter Estimates

model upper	Beta	Std. Error	Std. Beta	t	sig	lower
(Intercept) 0.364	0.000	0.149		0.000	1.000	-0.364
0.865	0.329	0.219	0.329	1.498	0.185	-0.208
0.106	-0.513	0.253	-0.513	-2.029	0.089	-1.131
1.578	1.035	0.222	1.035	4.658	0.003	0.491

Lampiran 5. Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS PKL

(PKL-L)

(Diisi oleh Pembimbing Lapangan PKL)

Nama Instansi Tempat PKL

: KPP Pratama Yogyakarta

Alamat Instansi

: Jl Panembahan Senopati No.20

Nama/Nomor Mahasiswa

: Maya Maryanah/17305144008

Program Studi

: Matematika / V.II.....

Lama Praktik

: 5 minggu/dari tanggal 13-01 s.d. 12-02

No.	Aspek yang Dinilai	Penilaian (angka)	Keterangan
1.	Kedisiplinan	100	
2.	Kreativitas	100	
3.	Ketekunan	100	
4.	Kerjasama	100	
5.	Kejujuran	100	
6.	Kesopanan (Tatakrama)	100	
7.	Semangat kerja (Etos Kerja)	100	
8.	Keuletan	100	
9.	Wawasan Keilmuan	100	
10.	Ketrampilan Bekerja	100	
	Jumlah	1000	

$$\text{NILAI RATA-RATA (PKL-L)} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{10} = 100$$

Catatan : Nilai dituliskan dalam bentuk angka

1. 0 – 55 : D (kurang)
2. 56 – 63: C (cukup)
3. 64 – 65: C⁺ (lebih dari cukup)
4. 66 – 70: B- (agak baik)
5. 71 – 74: B (baik)
6. 75 – 79: B⁺ (lebih dari baik)
7. 80 – 85: A- (baik sekali)
8. 86 – 100 : A (sangat baik sekali)

Yogyakarta .../.../2020

(Bambang Sutriyanto)
NIP.1963.03.2021.9.85031004